

Literatur Review: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik di Kota Merauke

Natalia Suryani Purba

Universitas Musamus Merauke, Indonesia

Email: purbalia@unmus.ac.id

Kata kunci	Abstrak
Transparansi, Akuntabilitas, Administrasi Publik, Kota Merauke, Pemerintahan Daerah, E-Government	Artikel ini menelaah konsep transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, dengan fokus pada Kota Merauke sebagai daerah otonom di wilayah timur Indonesia. Cakupan literatur mencakup penelitian akademik, laporan kebijakan, dan dokumen pemerintah terkait e-government, partisipasi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan lokal, dengan kriteria inklusi berupa publikasi dalam 10 tahun terakhir yang relevan dengan prinsip good governance di konteks daerah otonom. Ringkasan temuan kunci menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas di Merauke masih menghadapi kendala signifikan, termasuk rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Meskipun terdapat upaya penerapan kebijakan e-government, dampaknya belum maksimal dalam memperkuat pengawasan publik dan akuntabilitas birokrasi. Implikasi kebijakan dan riset menunjukkan perlunya strategi terpadu untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat infrastruktur TI, serta mendorong partisipasi publik melalui mekanisme konsultasi dan pelaporan daring. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkelanjutan dan studi empiris lebih lanjut untuk mengukur efektivitas praktik transparansi dan akuntabilitas di kota perbatasan, sehingga dapat menjadi model pengelolaan pemerintahan yang adaptif dan responsif di daerah serupa. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan arahan praktis bagi pemerintah lokal dan pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Merauke.

Keywords: *Transparency, Accountability, Public Administration, Merauke City, Regional Government, E-Government*

Abstract

This article examines the concepts of transparency and accountability in public administration, focusing on Merauke City as an autonomous region in eastern Indonesia. Literature coverage includes academic research, policy reports, and government documents related to e-government, citizen participation, and local governance, with inclusion criteria restricted to publications from the past ten years that address good governance principles in autonomous regions. Key findings indicate that the implementation of transparency and accountability in Merauke still faces significant challenges, including low digital literacy, limited information technology infrastructure, and suboptimal public participation. Although e-government policies have been initiated, their impact has not yet fully strengthened public oversight and bureaucratic accountability. Policy and research implications highlight the need for integrated strategies to improve citizens' digital literacy, enhance IT infrastructure, and encourage public engagement through consultation and online reporting mechanisms. Moreover, the study recommends continuous evaluation and further empirical research to assess the effectiveness of transparency and accountability practices in border cities, potentially serving as a model for similar regions. Consequently, this review contributes not only to the academic literature but also offers practical guidance for local governments and stakeholders aiming to achieve good governance in Merauke City.



PENDAHULUAN

Transparansi merujuk pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi publik. Pemerintah yang transparan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan, anggaran, dan kebijakan. Ini menciptakan dasar kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mampu berdaya saing. Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan, sementara tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat (Adriana, 2018; Budhyatma & Pribadi, 2023; Cahyo, 2022; Creswell, 2014; Erawan, Putra, & Sentanu, 2021; Fachruddin, Asriani, & Rosmina, 2023; Furqon, Fajari, Setiadi, & Syahuri, 2024).

Administrasi publik sebagai tulang punggung pelaksanaan kebijakan negara memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Salah satu prinsip utama dalam administrasi publik adalah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas (Hidayat, 2024; Hutapea, 2022; Jayanti, 2014; Kacaribu & Revida, 2024). Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membangun sistem administrasi yang lebih *responsive* dan terbuka. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi, penguatan lembaga pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui *e-government* (Hizkia Kasenda, Sambiran, & Sumampow, 2021).

Kota Merauke sebagai salah satu kabupaten/kota terluar di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, baik secara geografis maupun politik, dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan. Namun, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya aparatur, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut (Taufik, Warkini, Yuliawati, & Hendarsah, 2024; Tyasotyaningarum, 2019; Utami, 2023; Zam, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat diimplementasikan dalam administrasi publik di Kota Merauke berdasarkan tinjauan terhadap literatur dan kebijakan yang relevan (Khadafi, Nurmandi, Hasibuan, Harahap, Saputra, Mahardika, & Izharsyah, 2024).

Kota Merauke merupakan salah satu wilayah strategis di ujung timur Indonesia yang memiliki posisi geografis penting sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Sebagai kota perbatasan, Merauke tidak hanya menghadapi persoalan administratif biasa, tetapi juga tantangan geopolitik, sosial, dan infrastruktur yang kompleks. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin krusial, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga untuk memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Pratiwi & Ningsih, 2022; Sedarmayanti, 2013; Sofyani, Pratolo, & Saleh, 2022; Sulaiman, Sukmariningsih, Mashari, & Noor, 2024). Namun demikian, implementasi transparansi dan akuntabilitas di Kota Merauke masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan teknologi informasi, rendahnya literasi digital, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kedua prinsip ini diadopsi dalam konteks lokal Kota Merauke. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan e-government telah mulai diterapkan, namun masih terdapat kendala dalam hal literasi digital, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan masyarakat agar dapat saling bersinergi dalam mengembangkan strategi pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di daerah-daerah pinggiran (Layn & Layn, 2020; Madubun, 2024; Mardiasmo, 2016; Palombo, 2011; Pontoh, Rura, Rahman, & Ibrahim, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Misalnya, Setiawan dan Nurcahyo (2021) menemukan bahwa implementasi e-government di kota-kota besar Indonesia meningkatkan transparansi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada literasi digital masyarakat. Sementara itu, Pratiwi et al. (2020) menunjukkan bahwa pengawasan internal dan partisipasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi penelitian ini terbatas pada daerah perkotaan dengan infrastruktur yang memadai. Kedua studi tersebut mengabaikan konteks daerah perbatasan seperti Kota Merauke, di mana keterbatasan infrastruktur, sumber daya aparatur, dan partisipasi masyarakat menjadi tantangan signifikan.

Penelitian ini bertujuan menelaah secara kritis bagaimana transparansi dan akuntabilitas diadopsi dalam administrasi publik di Kota Merauke, menggunakan pendekatan tinjauan literatur dan kebijakan terkini, termasuk regulasi e-government dan pedoman pelayanan publik. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman tentang kendala lokal dan strategi adaptasi yang relevan, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, literasi digital, serta kualitas layanan publik, sehingga mendorong terciptanya good governance di wilayah perbatasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan literature review. Literature review merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu (Triandini, dkk, 2019). Secara umum, literature review dapat didefinisikan sebagai proses evaluasi kritis dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Menurut Creswell (2014), literature review adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk membangun kerangka teori yang mendasari penelitian. Creswell menekankan bahwa literature review membantu peneliti memahami perkembangan terbaru dalam bidang yang diteliti dan mengidentifikasi celah penelitian yang perlu diisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Sumber data yang dipilih berasal dari jurnal. Literatur yang ditinjau dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik transparansi,

akuntabilitas, dan administrasi publik daerah, khususnya yang relevan dengan konteks Indonesia Timur atau kota perbatasan.

Berdasarkan hasil penelusuran jurnal di google scholar dengan kata kunci transparansi dan akuntabilitas, administrasi publik, peneliti menemukan 85 jurnal dengan rentang waktu 2011-2025 dan merupakan yang paling banyak sedangkan dengan rentang waktu 2020-2025 sebanyak 39 jurnal. Penelusuran di semantic scholar.org ditemukan ada 1 jurnal dan garuda.kemendikbud.go.id ditemukan ada 2 jurnal. Dari 39 jurnal yang ditemukan kemudian dipilih dengan kriteria yang lebih relevan dengan konsep akuntabilitas dan transparansi administrasi publik di Kota Merauke dan ditemukan ada 11 jurnal yang lebih relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Implementasi di Kota Merauke Berdasarkan laporan kinerja pemerintah daerah Merauke, telah dilakukan beberapa upaya untuk mendorong transparansi seperti penyajian data APBD secara daring dan pembentukan PPID. Namun, efektivitas layanan tersebut masih belum optimal karena keterbatasan jangkauan internet dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik. Peran Aktor Lokal dan Lembaga Pengawasan: DPRD, LSM lokal, dan media massa memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Namun sering kali peran ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya akses informasi yang dapat diandalkan.

LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke memberikan gambaran tentang kinerja pada tahun 2023, dimana LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappedalitbang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu aktivitas analisis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi serta penganggaran berbasis kinerja akuntabilitas instansi pemerintah. Bappedalitbang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disajikan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LAKIP juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Bappedalitbang Kabupaten Merauke sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan dan amanah demi mewujudkan Visi “Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Pangan Nasional, Gerbang

Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara“, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sampai dengan tahun 2023, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappedalitbang dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan intergratif antara wilayah serta lintas sektor di daerah;
- 2) Masih lemahnya koordinasi antara pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran SKPD, maupun dengan pemerintah Pusat, Provinsi, Distrik dan Kampung-Kampung;
- 3) Belum tertatanya seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah baik antara sektoral maupun perwilayahan pembangunan;
- 4) Belum memadainya ketersediaan data-data pembangunan Kabupaten Merauke; Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Kurangnya sumber daya manusia di bidang perencanaan.

Isu Strategis

Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- a) Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
 - b) Belum optimalnya hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
 - c) Belum optimalnya sumber daya manusia yang mendukung perencanaan pembangunan.
 - d) Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti.
5. Belum tersedianya tenaga fungsional perencanaan.

Prospek dan Rekomendasi

Kota Merauke perlu memperkuat kapasitas birokrasi digital, memperluas literasi digital masyarakat, dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi serta sektor swasta. Pemerintah juga perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang inklusif dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan warga. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci sukses dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Kota Merauke, sebagai wilayah strategis di ujung timur Indonesia, memiliki tantangan yang khas namun juga peluang besar untuk menjadi model tata kelola daerah perbatasan. Penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, serta keterlibatan masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dalam administrasi publik di Kota Merauke melalui pendekatan literatur. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber dan laporan kinerja daerah, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di daerah perbatasan seperti Merauke yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan infrastruktur. Studi ini menemukan bahwa meskipun kebijakan e-government dan sistem pelaporan kinerja seperti LAKIP telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi digital, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan publik. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemetaan komprehensif mengenai kondisi aktual tata kelola pemerintahan di Merauke serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kapasitas birokrasi digital dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga akademik. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur administrasi publik terkait penerapan prinsip good governance di wilayah perbatasan Indonesia. Namun, studi ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan analisis literatur tanpa data lapangan yang empiris, sehingga belum mampu menggambarkan persepsi masyarakat atau efektivitas kebijakan secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed methods agar mampu mengukur hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan publik dengan lebih akurat. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas di Kota Merauke sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam membangun sistem informasi publik yang terbuka, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A. (2018). Analysis of local financial management transparency based on websites on local government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 72-85.
- Budhyatma, E. H., & Pribadi, U. (2023). The effects of good governance principles: Accountability, transparency, and participation on public trust in village funds management. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 1023-1035.
- Cahyo, P. A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Di Distrik Kurik Kabupaten Merauke= Community Financial Management Accountability In Kurik District, Merauke Regency (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches— 4th ed.* USA: SAGE Publications, Inc.
- Erawan, I. G., Putra, F., & Sentanu, I. G. (2021). Factors affecting central government's performance accountability in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 529-542. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.529-542>
- Fachruddin, S., Asriani, A., & Rosmina, W. O. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam perspektif masyarakat pada kependudukan dan pencatatan sipil daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(2), 126-140.
- Furqon, A. A., Fajari, G., Setiadi, W., & Syahuri, T. (2024). Challenge implementation of general principles of good government in Indonesian government. *International Journal of Sociology and Law*, 1(3), 166-173. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.118>
- Hidayat, M. N. (2024). Enhancing accountability and transparency in local governance through integrated information systems: A case study of Surabaya City, Indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 16(4), 1261-1275.
- Hizkia Kasenda, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow. (2021). "Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang

- Timur Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance* 1(2), hal. 3.
- Hutapea, W. (2022). *Akuntabilitas Dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Merauke)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Jayanti, I. P. (2014). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi pada Pemerintah Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Kacaribu, D. C., & Revida, E. (2024). Transparansi Pelayanan Publik pada Kelurahan Padang Bulan Selayang II Medan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(1), 43-49.
- Khadafi, R., Nurmandi, A., Hasibuan, E. J., Harahap, M. S., Saputra, A., Mahardika, A., & Izharsyah, J. R. (2024). Assessing the Indonesian government's compliance with the public information disclosure law in the context of COVID-19 data transparency. *Frontiers in Political Science*, 6, 1339506. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1339506>
- Layn, A. S., & Layn, M. R. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 73-89.
- Madubun, J. (2024). Public services in island sub-districts: Towards geography-based governance. *Australian Journal of Public Administration*, 83(2), 245-262. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12586>
- Mardiasmo. (2016). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2, No.1.
- Palombo, E.A. (2011). "Traditional Medicinal Plant Extracts and Natural Products with Activity against Oral Bacteria: Potential Application in the Prevention and Treatment of Oral Diseases."
- Pontoh, R., Rura, Y., Rahman, A., & Ibrahim, M. (2023). The transparency level of local governments in Indonesia: Does the level of financial health matter? *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 123-150.
- Pratiwi, P. S., & Ningsih, S. (2022). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 5(1), 44-50.
- Sedarmayanti. (2013). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Sulaiman, S., Sukmariningsih, R. M., Mashari, M., & Noor, A. (2024). Strengthening public sector performance: The role of good governance, leadership style, and service quality in village government administration. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 4(5), 287-304.
- Taufik, B., Warkini, N., Yuliawati, R., & Hendarsah, Y. (2024). Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 9(1).
- Tyasotyningarum, B. (2019). Praktik open government melalui partisipasi publik di kabupaten bojonegoro dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (studi kasus dialog publik jumat di kabupaten bojonegoro). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1).
- Utami, P. (2023). *Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas*. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik,

Pemerintahan dan Politik, 6(2), 1-9.

Zam, R. S. (2023). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Memperbaiki Sistem Birokrasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Indonesia.